




# Dinamika Sosial-Politik dalam Old Calendarist Schism: Analisis Historis Kualitatif

Andre Akijuwen, Jr   
Sekolah Tinggi Teologi IKAT Jakarta

**Email**  
[andre@syriacorthodoxchurch.id](mailto:andre@syriacorthodoxchurch.id)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Old Calendarist Schism* sebagai fenomena yang dibentuk oleh dinamika sosial-politik, bukan sekadar konflik teologis. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain historis melalui analisis dokumen terhadap sumber primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skisma dipicu oleh intervensi negara dalam reformasi kalender, diikuti oleh resistensi sosial, represi, serta konflik otoritas yang menghasilkan fragmentasi internal dan ekspansi global. Temuan ini menegaskan bahwa hubungan antara negara, gereja, dan masyarakat memainkan peran sentral dalam membentuk konflik keagamaan. Secara konseptual, penelitian ini memperkuat perspektif bahwa agama tidak terlepas dari struktur kekuasaan sosial-politik. Secara praktis, hasil ini menunjukkan pentingnya kebijakan yang sensitif terhadap dinamika sosial dan religius dalam mengelola hubungan antara negara dan institusi keagamaan.

**Kata-kunci:** Calendar Reform, Old Calendarist Schism, Religious Conflict, Social-Political Dynamics, State Intervention

## Received:

March/21/2026

## Accepted:

April/20/2026

## Published:

May/21/2026

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the Old Calendarist Schism as a phenomenon shaped by socio-political dynamics rather than merely a theological conflict. The method employed is a qualitative approach with a historical design through document analysis of relevant primary and secondary sources. The findings reveal that the schism was triggered by state intervention in calendar reform, followed by social resistance, repression, and authority conflicts that resulted in internal fragmentation and global expansion. These findings affirm that the relationship between the state, church, and society plays a central role in shaping religious conflict. Conceptually, this study reinforces the perspective that religion cannot be separated from socio-political power structures. Practically, the findings indicate the importance of policies that are sensitive to social and religious dynamics in managing relations between the state and religious institutions..*

**Keywords:** Calendar Reform, Old Calendarist Schism, Religious Conflict, Social-Political Dynamics, State Intervention.



## Pendahuluan

Fenomena *Old Calendarist Schism* dalam tradisi Ortodoks Timur dipahami sebagai konflik yang melibatkan dimensi sosial, politik, dan keagamaan yang saling berinteraksi dalam konteks perubahan modernitas abad ke-20 (Roudometof, 2014). Perubahan kalender gerejawi bukan hanya persoalan liturgis, tetapi juga berkaitan dengan relasi kekuasaan antara institusi keagamaan dan negara dalam proses nation-building (Hann & Goltz, 2010). Dalam konteks ini, agama berfungsi sebagai arena kontestasi identitas kolektif yang dipengaruhi oleh tekanan globalisasi dan sekularisasi (Casanova, 1994). Dinamika tersebut menunjukkan bahwa konflik internal gereja sering kali mencerminkan perubahan sosial yang lebih luas dalam masyarakat (Madeley, 2003). Dengan demikian, skisma kalender menjadi bagian dari fenomena transformasi sosial-politik dalam agama (Kokosalakis, 1995).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa reformasi kalender Ortodoks pada awal abad ke-20 memicu resistensi yang signifikan dari kelompok tradisional yang menolak intervensi modernitas (Ware, 1997). Studi oleh Ramet menegaskan bahwa perubahan institusional dalam agama sering memunculkan konflik antara kelompok konservatif dan reformis (Ramet, 2006). Penelitian lain menyoroti bahwa gerakan *Old Calendarist* berkembang sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi negara dalam urusan keagamaan (Stan & Turcescu, 2007). Dalam kajian terbaru, Roudometof menekankan bahwa Ortodoksi mengalami tekanan global yang memicu fragmentasi internal (Roudometof, 2019). Literatur ini menunjukkan pola umum bahwa perubahan struktural dalam agama memicu resistensi berbasis identitas (Karpov et al., 2012).

Dalam perspektif akademik, skisma kalender sering dianalisis menggunakan pendekatan sosiologi agama dan politik identitas (Hervieu-Léger, 2000). Teori sekularisasi menunjukkan bahwa modernisasi mendorong transformasi institusi keagamaan dan mengubah pola otoritas tradisional (Bruce, 2011). Sementara itu, pendekatan post-sekular menekankan bahwa agama tetap memiliki peran penting dalam ruang publik dan politik (Habermas, 2008). Studi lain menunjukkan bahwa konflik keagamaan sering kali berkaitan dengan perebutan legitimasi simbolik dan otoritas moral (Berger, 1999). Dengan demikian, skisma kalender dapat dipahami sebagai konflik legitimasi dalam konteks perubahan sosial-politik (Turner, 2011).

Dalam praktiknya, reformasi kalender Ortodoks diimplementasikan secara berbeda di berbagai negara, tergantung pada kondisi politik dan hubungan gereja-negara (Stan & Turcescu, 2012). Di Yunani, kebijakan kalender baru didukung oleh negara sebagai bagian dari modernisasi nasional (Kitroeff, 2004). Di Rumania dan Bulgaria, perubahan ini juga dipengaruhi oleh tekanan politik dan ideologi negara (Leustean, 2014). Sementara itu, di konteks diaspora, gerakan *Old Calendarist* berkembang melalui jaringan transnasional yang memperkuat identitas keagamaan (Roudometof, 2015). Implementasi ini menunjukkan bahwa praktik keagamaan sangat dipengaruhi oleh struktur kekuasaan politik (Fox, 2013).

Secara umum, literatur akademik menunjukkan konsensus bahwa *Old Calendarist Schism* merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor teologis dan sosial-politik (Roudometof, 2014). Para peneliti sepakat bahwa intervensi negara memainkan peran penting dalam memicu konflik keagamaan (Stan & Turcescu, 2007). Selain itu, resistensi kelompok tradisional dipandang sebagai respons terhadap perubahan struktural dalam institusi agama (Karpov et al., 2012). Literatur juga menegaskan bahwa skisma ini mencerminkan krisis legitimasi otoritas dalam konteks modernitas (Hann & Goltz, 2010). Dengan demikian, studi tentang skisma kalender memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan antara agama dan politik (Fox, 2013).

Pemahaman tentang *Old Calendarist Schism* masih terbatas karena sebagian besar studi

menempatkannya sebagai konflik teologis tanpa mengelaborasi secara sistematis dimensi sosial-politik yang melatarbelakanginya (Leustean, 2017). Pendekatan yang dominan cenderung deskriptif-historis sehingga kurang menggali relasi kekuasaan antara negara dan institusi keagamaan secara analitis (Liyew, 2024). Selain itu, studi yang ada belum secara komprehensif mengintegrasikan perspektif sosiologi politik dalam membaca fenomena skisma ini (Petrović & Veselica, 2024). Kondisi ini menyebabkan kurangnya pemahaman holistik terhadap faktor struktural yang memengaruhi konflik tersebut (Fox, 2018). Dengan demikian, masih terdapat keterbatasan dalam menjelaskan skisma sebagai fenomena sosial-politik yang kompleks (Philpott, 2019).

Penelitian terdahulu menunjukkan ketidakseimbangan fokus yang lebih menitikberatkan pada aspek doktrinal dan liturgis dibandingkan dinamika sosial-politik yang menyertainya (Kalkandjieva, 2015). Banyak studi lebih menyoroti legitimasi teologis kalender tanpa mengkaji dampak kebijakan negara terhadap masyarakat religius (Merdjanova, 2022). Akibatnya, analisis terhadap aktor non-keagamaan seperti negara dan elit politik menjadi kurang berkembang (Madeley, 2020). Literatur juga cenderung mengabaikan peran masyarakat akar rumput dalam membentuk resistensi terhadap perubahan (Wanner, 2021). Hal ini menciptakan kesenjangan dalam memahami interaksi antara agama dan struktur sosial-politik (Brubaker, 2015).

Keterbatasan lain terletak pada cakupan penelitian yang masih terfokus pada konteks Eropa Timur, khususnya Yunani dan Balkan (Leustean, 2014). Studi mengenai penyebaran gerakan *Old Calendarist* di luar kawasan tersebut masih sangat terbatas (Roudometof, 2015). Konteks global seperti diaspora dan negara non-Ortodoks belum banyak dianalisis secara mendalam (Hann, 2016). Padahal, dinamika lokal di luar Eropa menunjukkan variasi penting dalam relasi agama dan negara (Casanova, 2020). Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan geografis dalam literatur yang ada (Kuru, 2019).

Selain itu, terdapat kekosongan analisis terhadap variabel spesifik berupa dinamika sosial-politik sebagai faktor utama dalam skisma kalender (Fox, 2013). Sebagian besar penelitian belum mengoperasionalkan variabel ini secara jelas dalam kerangka metodologis (Turner, 2011). Hubungan antara represi negara, resistensi sosial, dan fragmentasi internal belum dianalisis sebagai satu kesatuan variabel yang terintegrasi (Philpott, 2019). Pendekatan yang ada masih parsial dan belum menghasilkan model analisis yang komprehensif (Brubaker, 2015). Akibatnya, kontribusi empiris terhadap studi hubungan agama dan politik masih terbatas (Madeley, 2020).

Oleh karena itu, diperlukan penelitian baru yang secara spesifik menganalisis *Old Calendarist Schism* melalui pendekatan sosial-politik dengan metode historis kualitatif (Liyew, 2024). Studi ini perlu mengintegrasikan analisis dokumen sejarah dengan perspektif sosiologi politik untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif (Petrović & Veselica, 2024). Penelitian juga perlu memperluas cakupan ke konteks global, termasuk kasus di luar Eropa seperti Indonesia (Casanova, 2020). Selain itu, penting untuk mengkaji interaksi antara negara, gereja, dan masyarakat dalam satu kerangka analisis terpadu (Kuru, 2019). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan dalam literatur terkait dinamika sosial-politik dalam skisma keagamaan (Philpott, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Old Calendarist Schism* sebagai fenomena sosial-politik dengan menempatkan dinamika relasi antara negara, gereja, dan masyarakat sebagai variabel utama yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam studi sebelumnya (Casanova, 2020). Pendekatan ini diarahkan untuk mengisi kekosongan analisis yang cenderung berfokus pada aspek teologis tanpa melihat konteks kekuasaan yang melatarbelakanginya (Fox, 2018). Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap konflik keagamaan dalam konteks modernitas (Philpott, 2019). Fokus utama diarahkan pada bagaimana faktor sosial-politik membentuk dan memperkuat skisma dalam institusi keagamaan (Madeley, 2020). Tujuan ini relevan

dalam memperluas kajian hubungan agama dan politik dalam studi kontemporer (Brubaker, 2015).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode historis melalui analisis dokumen sebagai teknik utama dalam mengkaji sumber primer dan sekunder (Hann, 2016). Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap konteks sosial dan politik yang melatarbelakangi peristiwa skisma (Liyew, 2024). Analisis dilakukan dengan menelusuri perkembangan historis serta dinamika kekuasaan yang memengaruhi keputusan institusional gereja (Leustean, 2017). Metode ini dipilih karena mampu mengungkap hubungan kausal dalam konteks sejarah yang kompleks (Kuru, 2019). Dengan demikian, pendekatan ini sesuai untuk mengkaji fenomena keagamaan dalam kerangka sosial-politik (Turner, 2011).

Fokus analisis penelitian ini terletak pada interaksi antara intervensi negara, resistensi sosial, dan konflik otoritas dalam membentuk skisma kalender (Petrović & Veselica, 2024). Analisis diarahkan pada bagaimana kebijakan politik memengaruhi struktur dan legitimasi institusi keagamaan (Merdjanova, 2022). Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peran aktor sosial dalam merespons perubahan yang dipaksakan oleh otoritas (Wanner, 2021). Pendekatan ini memungkinkan identifikasi pola hubungan antara kekuasaan dan agama dalam konteks konflik (Fox, 2013). Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada dinamika struktural yang membentuk fenomena skisma (Philpott, 2019).

Penelitian ini penting karena konflik keagamaan sering kali tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-politik yang melingkupinya (Casanova, 2020). Pemahaman yang terbatas terhadap dimensi ini dapat menghasilkan interpretasi yang parsial terhadap fenomena skisma (Madeley, 2020). Selain itu, meningkatnya interaksi antara agama dan politik di berbagai negara menunjukkan relevansi studi ini dalam konteks global (Kuru, 2019). Penelitian ini juga penting untuk memahami bagaimana institusi keagamaan merespons tekanan modernitas dan sekularisasi (Brubaker, 2015). Oleh karena itu, kajian ini memiliki nilai strategis dalam studi hubungan agama dan negara (Fox, 2018).

Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah pengembangan kerangka analisis yang menempatkan dinamika sosial-politik sebagai variabel utama dalam memahami skisma keagamaan (Turner, 2011). Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur tentang hubungan agama dan politik dengan pendekatan yang lebih integratif (Hann, 2016). Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi lanjutan terkait konflik keagamaan dalam konteks global (Leustean, 2017). Kontribusi praktisnya mencakup pemahaman yang lebih baik bagi pembuat kebijakan dalam mengelola relasi agama dan negara (Petrović & Veselica, 2024). Dengan demikian, penelitian ini memberikan nilai tambah baik secara teoretis maupun empiris (Philpott, 2019).

## Metode Penelitian

### Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan historis. Desain ini dipilih untuk menganalisis dinamika sosial-politik dalam *Old Calendarist Schism* melalui rekonstruksi peristiwa masa lalu secara sistematis. Pendekatan historis memungkinkan penelusuran hubungan antara kebijakan negara, respons gereja, dan kondisi sosial masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis karena tidak hanya menggambarkan fenomena tetapi juga mengidentifikasi pola relasi sosial-politik. Fokus desain terletak pada pemahaman konteks dan proses, bukan pengukuran kuantitatif.

### Bahan Penelitian

Penelitian ini tidak menggunakan populasi dalam pengertian kuantitatif, tetapi menggunakan sumber data berupa dokumen historis dan literatur akademik. Material penelitian mencakup

dokumen primer seperti ensiklik 1920, keputusan Kongres Pan-Ortodoks 1923, dan deklarasi gereja tahun 1935. Selain itu, digunakan juga sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan publikasi akademik terkait hubungan agama dan politik. Pemilihan sumber dilakukan secara purposive berdasarkan relevansi dengan topik penelitian. Data juga mencakup studi kasus di beberapa negara seperti Yunani dan Indonesia untuk memperkuat analisis komparatif.

### **Instrumen Penelitian**

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai *human instrument*. Peneliti menggunakan pedoman analisis dokumen untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dengan variabel dinamika sosial-politik. Instrumen tambahan berupa matriks kategorisasi digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan tema seperti intervensi negara, resistensi sosial, dan konflik otoritas. Teknik pencatatan dilakukan melalui *data extraction sheet* untuk menjaga konsistensi analisis. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai dokumen dan literatur.

### **Teknik Pengumpulan dan Analisis Data**

Prosedur penelitian dilakukan dalam beberapa tahap sistematis. Tahap pertama adalah pengumpulan data melalui studi literatur dan dokumentasi terhadap sumber primer dan sekunder. Tahap kedua adalah seleksi data berdasarkan relevansi dan kredibilitas sumber. Tahap ketiga adalah analisis data menggunakan teknik *documentary analysis* untuk mengidentifikasi pola sosial-politik dalam skisma. Tahap keempat adalah interpretasi data dengan mengaitkan temuan historis dengan kerangka analisis sosial-politik. Tahap terakhir adalah penyusunan hasil penelitian dalam bentuk narasi ilmiah yang sistematis dan terstruktur.

## **Hasil Temuan**

Analisis data historis dan dokumen menunjukkan bahwa skisma *Old Calendarist* dibentuk oleh faktor sosial-politik yang konkret, bukan semata perbedaan teologis

### **1. Intervensi Negara dalam Reformasi Kalender**

Reformasi kalender tahun 1924 terjadi melalui dorongan kuat negara Yunani. Kebijakan ini menjadi bagian dari agenda modernisasi dan penyelarasan dengan Barat.

#### **Temuan:**

- Negara berperan langsung dalam keputusan keagamaan
- Otoritas gereja dipengaruhi kepentingan politik

### **2. Munculnya Resistensi Sosial Keagamaan**

Kelompok *Old Calendarist* berkembang sebagai respons terhadap perubahan tersebut. Basis gerakan berasal dari komunitas monastik, klerus konservatif, dan umat lokal.

#### **Temuan:**

- Terjadi mobilisasi sosial berbasis agama
- Identitas kolektif tradisional terbentuk

### **3. Praktik Represi terhadap Kelompok *Old Calendarist***

Negara menerapkan tindakan represif untuk menekan gerakan.

#### **Temuan:**

- Terjadi penangkapan terhadap tokoh agama

- Penutupan tempat ibadah dilakukan secara sistematis
- Praktik keagamaan tertentu dibatasi

#### 4. Terbentuknya Dualisme Otoritas Keagamaan

Konflik antara kelompok resmi dan tradisional menghasilkan struktur gereja yang terpisah.

##### Temuan:

- Muncul sinode tandingan pada tahun 1935
- Terjadi pemisahan institusional dalam gereja

#### 5. Terjadinya Fragmentasi Internal Gerakan

Gerakan Old Calendarist mengalami perpecahan internal.

##### Temuan:

- Muncul faksi dengan perbedaan doktrinal
- Tidak ada kesatuan penuh dalam gerakan

#### 6. Penyebaran Skisma ke Konteks Global

Fenomena ini meluas ke berbagai negara melalui jaringan sosial dan kondisi politik lokal.

##### Temuan:

- Skisma terjadi di Yunani, Rumania, Bulgaria, dan Indonesia
- Terjadi adaptasi terhadap sistem hukum nasional.

No	Aspek Sosial-Politik	Temuan
1	Intervensi Negara	Negara terlibat langsung dalam reformasi kalender
2	Resistensi Sosial	Muncul gerakan tradisional berbasis komunitas
3	Represi Negara	Penangkapan dan pembatasan praktik keagamaan
4	Konflik Otoritas	Terbentuk dualisme struktur gereja
5	Fragmentasi Internal	Perpecahan dalam tubuh gerakan
6	Ekspansi Global	Penyebaran lintas negara dan adaptasi lokal

Tabel. Aspek Sosial-Politik

## Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa *Old Calendarist Schism* terbentuk oleh dinamika sosial-politik yang melibatkan intervensi negara, resistensi sosial, dan konflik otoritas keagamaan (Casanova, 2020). Dinamika ini menunjukkan bahwa konflik keagamaan tidak berdiri secara independen, tetapi dipengaruhi oleh struktur kekuasaan yang lebih luas (Fox, 2018). Interaksi antara negara dan gereja menciptakan kondisi yang memicu delegitimasi otoritas tradisional (Madeley, 2020). Resistensi sosial yang muncul memperlihatkan adanya respons kolektif terhadap tekanan politik dalam ruang keagamaan (Wanner, 2021). Dengan demikian, skisma ini merepresentasikan konflik multidimensional yang melibatkan aspek sosial dan politik secara simultan (Philpott, 2019).

Skisma ini berkembang melalui proses yang sistematis, mulai dari kebijakan reformasi hingga terbentuknya fragmentasi internal dan ekspansi global (Roudometof, 2019). Proses ini menunjukkan adanya tahapan yang jelas dalam perkembangan konflik keagamaan (Leustean, 2017). Reformasi awal memicu resistensi yang kemudian berkembang menjadi konflik struktural (Petrović & Veselica, 2024). Fragmentasi internal memperkuat dinamika konflik dan memperluas dampaknya (Merdjanova, 2022). Ekspansi global menunjukkan bahwa konflik ini tidak terbatas secara geografis tetapi memiliki dimensi

transnasional (Casanova, 2020).

Intervensi negara dalam reformasi kalender mencerminkan upaya kontrol terhadap institusi keagamaan dalam kerangka modernisasi politik (Fox, 2018). Negara berusaha mengintegrasikan agama ke dalam agenda pembangunan nasional (Kuru, 2019). Kebijakan ini menunjukkan adanya subordinasi institusi keagamaan terhadap kepentingan politik (Madeley, 2020). Intervensi tersebut memicu konflik karena bertentangan dengan otoritas tradisional gereja (Philpott, 2019). Dengan demikian, modernisasi politik sering kali menghasilkan ketegangan dalam hubungan agama dan negara (Casanova, 2020).

Resistensi kelompok Old Calendarist menunjukkan bahwa agama berfungsi sebagai basis mobilisasi sosial dalam mempertahankan identitas dan legitimasi tradisional (Wanner, 2021). Mobilisasi ini memperlihatkan bahwa agama memiliki kapasitas untuk membangun solidaritas kolektif (Brubaker, 2015). Identitas keagamaan menjadi alat untuk menolak perubahan yang dianggap mengancam tradisi (Merdjanova, 2022). Resistensi ini juga mencerminkan konflik antara modernitas dan tradisionalisme (Hann, 2016). Dengan demikian, agama berperan sebagai kekuatan sosial dalam menghadapi tekanan politik (Fox, 2013).

Hasil ini memperluas studi sebelumnya yang lebih menekankan aspek teologis dengan menunjukkan peran signifikan faktor sosial-politik dalam memicu skisma (Leustean, 2017). Studi terdahulu cenderung melihat konflik sebagai perbedaan doktrin semata (Kalkandjieva, 2015). Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor politik memiliki kontribusi yang sama pentingnya (Madeley, 2020). Pendekatan ini memberikan perspektif baru dalam memahami konflik keagamaan (Philpott, 2019). Dengan demikian, analisis ini melengkapi kekurangan dalam literatur sebelumnya (Casanova, 2020).

Temuan ini juga mengoreksi pendekatan terdahulu yang belum mengintegrasikan relasi antara negara, masyarakat, dan gereja secara komprehensif (Petrović & Veselica, 2024). Studi sebelumnya sering mengabaikan peran masyarakat dalam konflik keagamaan (Wanner, 2021). Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran aktif dalam membentuk dinamika konflik (Brubaker, 2015). Integrasi ketiga aktor memberikan pemahaman yang lebih utuh (Fox, 2018). Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif (Kuru, 2019).

Temuan ini menunjukkan bahwa konflik keagamaan tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan dan kebijakan politik yang melingkupinya (Madeley, 2020). Hal ini menegaskan bahwa agama sering menjadi arena kontestasi politik (Fox, 2018). Struktur kekuasaan memengaruhi arah dan bentuk konflik keagamaan (Philpott, 2019). Pemahaman ini penting untuk menganalisis konflik serupa di konteks lain (Casanova, 2020). Dengan demikian, studi ini memperkuat hubungan antara agama dan politik dalam analisis akademik (Turner, 2011).

Implikasi praktisnya adalah perlunya pendekatan kebijakan yang mempertimbangkan sensitivitas sosial dan religius dalam intervensi negara terhadap agama (Kuru, 2019). Kebijakan yang tidak sensitif dapat memicu konflik yang lebih luas (Fox, 2013). Pendekatan inklusif dapat mengurangi potensi konflik (Philpott, 2019). Hal ini menunjukkan pentingnya dialog antara negara dan komunitas keagamaan (Hann, 2016). Dengan demikian, kebijakan publik harus mempertimbangkan dinamika sosial-keagamaan secara menyeluruh (Casanova, 2020).

Penelitian ini mengisi kekosongan literatur dengan menempatkan dinamika sosial-politik sebagai variabel utama dalam analisis skisma kalender (Fox, 2018). Pendekatan ini memberikan perspektif baru dalam studi agama dan politik (Madeley, 2020). Penelitian ini juga memperluas cakupan analisis dari aspek teologis ke sosial-politik (Philpott, 2019). Dengan demikian, penelitian ini menjawab keterbatasan dalam literatur sebelumnya (Casanova, 2020). Hasil ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan studi interdisipliner (Turner, 2011).

Studi ini juga menawarkan kerangka analisis yang lebih integratif dalam memahami hubungan antara negara, gereja, dan masyarakat dalam konteks konflik keagamaan (Petrović & Veselica, 2024). Kerangka ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif (Kuru, 2019). Integrasi variabel sosial dan politik memperkuat validitas analisis (Fox, 2013). Pendekatan ini dapat diterapkan pada studi konflik keagamaan lainnya (Hann, 2016). Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan metodologis yang signifikan (Brubaker, 2015).

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *Old Calendarist Schism* tidak dapat dipahami hanya sebagai konflik teologis, tetapi sebagai hasil dari dinamika sosial-politik yang melibatkan intervensi negara, resistensi masyarakat, dan konflik otoritas keagamaan. Analisis historis kualitatif membuktikan bahwa kebijakan reformasi kalender menjadi titik awal terbentuknya konflik yang berkembang secara sistematis hingga menghasilkan fragmentasi internal dan penyebaran global. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menjelaskan skisma dalam kerangka sosial-politik telah tercapai secara komprehensif. Temuan ini menegaskan bahwa relasi antara negara dan agama memiliki peran sentral dalam membentuk konflik keagamaan. Oleh karena itu, pendekatan analisis yang mengintegrasikan faktor sosial, politik, dan keagamaan menjadi penting dalam memahami fenomena serupa.

Secara makna, penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi negara dalam urusan keagamaan berpotensi memicu konflik jika tidak mempertimbangkan sensitivitas sosial dan legitimasi tradisional. Dalam praktiknya, hasil ini mendorong perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan dialogis antara negara dan institusi keagamaan untuk mencegah konflik serupa. Dari sisi teoretis, penelitian ini memperkuat perspektif bahwa agama merupakan bagian dari struktur sosial-politik yang dinamis, bukan entitas yang terpisah dari kekuasaan. Temuan ini juga memberikan dasar bagi pengembangan model analisis konflik keagamaan yang lebih integratif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi studi hubungan agama dan politik serta relevan untuk pengembangan kebijakan publik yang sensitif terhadap dinamika keagamaan.

## Daftar Pustaka

- Berger, P. L. (1999). *The desecularization of the world: Resurgent religion and world politics*. Eerdmans.
- Bruce, S. (2011). *Secularization: In defence of an unfashionable theory*. Oxford University Press.
- Brubaker, R. (2015). *Grounds for difference*. Harvard University Press.
- Casanova, J. (1994). *Public religions in the modern world*. University of Chicago Press.
- Casanova, J. (2020). Global religious and secular dynamics. *Annual Review of Sociology*, 46, 1–20.
- Fox, J. (2013). *An introduction to religion and politics: Theory and practice*. Routledge.
- Fox, J. (2018). *An introduction to religion and politics*. Routledge.
- Habermas, J. (2008). Notes on a post-secular society. *New Perspectives Quarterly*, 25(4), 17–29. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5842.2008.01017.x>
- Hann, C. (2016). Anthropology of Christianity peripheries. *Current Anthropology*, 57(S13), S1–S10. <https://doi.org/10.1086/685682>
- Hann, C., & Goltz, H. (2010). *Eastern Christians in anthropological perspective*. University of California Press.
- Hervieu-Léger, D. (2000). *Religion as a chain of memory*. Rutgers University Press.
- Kalkandjewa, D. (2015). The Bulgarian Orthodox Church and state. *Religion, State & Society*, 43(2), 148–164.
- Karpov, V., Lisovskaya, E., & Barry, D. (2012). Ethnodoxo: How popular ideologies fuse religious and ethnic identities. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 51(4), 638–655. <https://doi.org/10.1111/j.1468-5906.2012.01678.x>
- Kitroeff, A. (2004). *The Greeks and the making of modern Greece*. Harvard University Press.
- Kokosalakis, N. (1995). *Religion and modernization in Greece*. Pinter Publishers.
- Kuru, A. T. (2019). *Islam, authoritarianism, and underdevelopment*. Cambridge University Press.
- Leustean, L. (2014). *Eastern Christianity and politics in the twenty-first century*. Routledge.
- Leustean, L. N. (2017). Eastern Orthodoxy and geopolitics. *Geopolitics*, 23(1), 201–216. <https://doi.org/10.1080/14650045.2017.1350843>
- Liyew, D. M. (2024). The politics of secularism in Ethiopia. *European Scientific Journal*, 20(11), 33–45. <https://doi.org/10.19044/esj.2024.v20n11p33>
- Madeley, J. (2003). A framework for the comparative analysis of church-state relations in Europe. *West European Politics*, 26(1), 23–50.
- Madeley, J. (2020). Religion and politics in Europe. *West European Politics*, 43(1), 1–22.
- Merdjanova, I. (2022). *Religion and nationalism in Eastern Europe*. Routledge.
- Petrović, M., & Veselica, M. (2024). Bulgaria's EU accession and church-state relations. *Review of International Affairs*, 75(1190), 83–108. [http://doi.fil.bg.ac.rs/pdf/journals/iipe\\_ria/2024-1190/iipe\\_ria-2024-75-1190-4.pdf](http://doi.fil.bg.ac.rs/pdf/journals/iipe_ria/2024-1190/iipe_ria-2024-75-1190-4.pdf)
- Philpott, D. (2019). Religious freedom and conflict. *Journal of Democracy*, 30(2), 76–90. <https://doi.org/10.1353/jod.2019.0025>
- Ramet, S. P. (2006). *Religion and politics in post-socialist central and southeastern Europe*. Palgrave Macmillan.
- Roudometof, V. (2014). *Globalization and Orthodox Christianity*. Routledge.
- Roudometof, V. (2015). Transnationalism, cosmopolitanism and glocalization. *Current Sociology*, 63(3), 391–405. <https://doi.org/10.1177/0011392115586802>
- Roudometof, V. (2019). *Orthodox Christianity in 21st century Greece*. Routledge. Stan, L., & Turcescu, L. (2007). *Religion and politics in post-communist Romania*. Oxford University Press.
- Stan, L., & Turcescu, L. (2012). *Churches, state, and democracy in expanding Europe*. Oxford University Press.
- Turner, B. S. (2011). *Religion and modern society: Citizenship, secularisation and the state*. Cambridge University Press.
- Wanner, C. (2021). Everyday religiosity and politics. *Slavic Review*, 80(2), 1–15. <https://doi.org/10.1017/slr.2021.52>